

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo



GORONTALO.RGOL.ID—Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango meraih predikat Opini, Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) (WTP). Ini sesuai pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019.

Ini ditegaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo Rahmadi SE, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2019 di wilayah Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan di aula BPK-RI perwakilan Provinsi Gorontalo Kamis (4/6) kemarin.

Hadir saat itu, Walikota Marten Taha, Wakil Wali Kota Ryan Kono, Ketua DPRD Mohammad Rivai. Kabupaten Gorontalo dihadiri langsung oleh Bupati Nelson Pomalingo M.Pd, Ketua DPRD Syam T Ase, Sekkab Hadijah Tayeb, Kepala Dinas, Pendapatan dan Keuangan Roswati Lasimpala.

Dari Bone Bolango dihadiri langsung Bupati Hamim Pou S Skom, ketua DPRD Bone Bolango didampingi kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Bonbol.

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo Raden Murwantara AK. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo Rahmadi SE mengatakan. Sesuai dengan UU No 15-2004, dan UU no 15 tahun 2006.

BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 untuk pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo

Dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system intern.

" tahun 2019 merupakan tahun ke 5 bagi pemerintah pusat dan daerah se Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik system akuntansi maupun penyajian laporan keuangan.

Dengan penerapan berbasis akrual. Pemerintah daerah dapat lebih komprehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta penggunaan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih," ujar Rahmadi SE.

Rahmadi sendiri mengapresiasi usaha usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh setiap pemda atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, yang sebagian besar sesuai dengan rencana dan aksi atau action plan yang dibuat kepala daerah, sehingga LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

"Alhamdulillah. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 ini dapat diserahkan kepada ketua DPRD dan kepala daerah Kamis 4 Juni 2020," ungkap Rahmadi SE. (riel/RG)